

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dari setiap instansi pemerintah agar terciptanya lingkungan yang dapat memacu perilaku yang positif dan manajemen yang baik. Terutama dapat mendorong seluruh pihak agar memiliki tanggung jawab dan kesadaran tentang pentingnya penegakkan sistem pengendalian intern.

Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang diikuti dengan perubahan dasar hukum. Dimulai pada tahun 1975, dimana pada saat itu sistem yang digunakan adalah sistem administrasi atau tata usaha keuangan daerah yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta PPNo. 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengalami perubahan yang mendasar dalam sistem pengelolaan Negara yang dulunya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dengan diberlakukannya Undang- Undang ini, peran pemerintah pusat menjadi semakin memberikan peran atau wewenang yang lebih luas lagi bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan membangun wilayahnya.

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Salah satu unsur penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset.

Sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Sistem dan prosedur aset/barang milik daerah mencakup sistem dan prosedur perencanaan,

penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, serta penghapusan.

Kas merupakan salah satu harta yang sangat vital yang perlu diperiksa ketelitian dan kebenaran akuntansinya, menjaga efisiensi dalam penggunaannya, serta terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan. Kas dilihat dari sifatnya merupakan aset yang paling lancar dan hampir setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas merupakan komponen penting dalam kelancaran jalannya kegiatan operasional. Karena sifat kas yang likuid, sehingga diperlukan pengendalian intern terhadap kas dengan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan. Selain itu juga diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi-fungsi pengeluaran kas.

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, pemerintah harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan padanya. Apabila perumusan tanggung jawab tidak jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Untuk mengawasi pengeluaran kas, maka diperlukan pengendalian intern yang baik terhadap kas yang memerlukan prosedur-prosedur yang memadai untuk melindungi pengeluaran kas.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka merupakan salah satu instansi yang berperan aktif dalam pembangunan sehingga penggunaan dana atau kas perlu dimaksimalkan dengan

baik agar tidak terjadi penyelewengan dan terserap sesuai dengan rencana penggunaan dananya sehingga pada akhir tahun per 31 Desember tahun berjalan kas yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran SKPD Nihil.

Berikut ini adalah kondisi kas pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah Kabupaten Malaka untuk tahun 2016- 2017.

Tabel 1.1
Kas pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah Kabupaten Malaka Per 31 Desember Tahun 2016-2017 (Dalam Miliar)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo Kas (Rp)
2016	5.344.084.904,00	5.280.258.357,00	63.826.547,00
2017	6.405.050.556,00	6.405.050.556,00	0

Sumber :Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Malaka, 2018

Dari tabel 1.1 menunjukkan kondisi sisa kas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Malaka selama 2 (dua) tahun terakhir. Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat sisa kas sebesar Rp. 63.826.547,00 dan pada tahun 2017 sisa kas yang ada pada bendahara pengeluaran adalah tidak ada/nihil.

Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas yang digunakan di bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah kabupaten Malaka adalah sub sistem akuntansi pengeluaran kas uang persediaan (UP) adalah uang yang disediakan untuk mengisi tiap-tiap SKPD yang dilakukan sekali dalam setahun, sub sistem akuntansi pengeluaran kas ganti uang (GU) adalah uang

yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang sudah terpakai dan sub sistem akuntansi pengeluaran kas tambah uang (TU) adalah jika ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo uang persediaan tidak akan cukup untuk membiayainya maka akan dilakukan tambahan uang ke SKPD.

Ditinjau dari segi realisasi anggaran fenomena yang terjadi dalam bagian kas yang ada pada bendahara pengeluaran SKPD pada tahun 2016 terdapat masalah yang dilakukan bendahara pengeluaran yaitu pengeluaran uang kas/tunai dan pengadministrasian yang kurang akurat sehingga terjadi ketidakcocokan antara saldo yang dilaporkan dan saldo kas fisik yang ada ditangan bendahara.

Berikut ini rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2016 yang dimana saldo buku yang dilaporkan masih tersisa Rp. 63. 826.547,00 tetapi saldo kas fisik yang ada pada bendahara pengeluaran tidak ada sama sekali :

Penerimaan :

SP2D	Rp. 5.334.067.919,00
Pajak penghasilan Ps 21	75.000,00
Pajak penghasilan Ps	22 2.137.411,00
Pajak penghasilan Ps 23	831.800,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6.972.774,00
Lain-lain	0,00
Jumlah Penerimaan :	Rp 5.344.084.904,00

Pengeluaran :

SPJ (LS+UP/GU/TU)	Rp. 5.270.241.372,00
Pajak penghasilan Ps 21	75.000,00
Pajak penghasilan Ps	1.877.411,00
Pajak penghasilan Ps 23	831.800,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7.232.774,00
Lain-lain	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran	Rp. 5.280.258.357,00
Saldo Kas	Rp. 63.826.547,00

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa kondisi kas 2016-2017 yang terdapat pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah Kabupaten Malaka menggambarkan pelaksanaan sistem pengendalian intern kas belum efektif.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pengeluaran Kas pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Malaka

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menentukan kebijakan dalam penerapan sistem pengendalian intern kas sehingga pada akhir tahun tidak terdapat sisa kas dan saldo kas yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran nihil karena semua kegiatan dapat dieksekusi oleh semua pihak terkait pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat daerah Kabupaten Malaka.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang diperoleh melalui proses perkuliahan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada peneliti lain, untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau penelitian serupa baik kalangan dari mahasiswa maupun pihak- pihak yang berkepentingan.